



# TREND SUBSEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PDRB, KESEMPATAN KERJA DAN EKSPOR PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Putra Agustinus Simarmata<sup>1</sup>, Jumri Dulamin<sup>2</sup>, M. Damiri<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Alumni Jurusan Kehutanan, Faperta, Universitas Palangka Raya

<sup>2)</sup> Dosen Jurusan Kehutanan, Faperta, Universitas Palangka Raya

## ABSTRACT

*This study is to analyze the magnitude of forestry subsector trends on the economy, especially on Gross Regional Domestic Revenue, Job Opportunities and Pulang Pisau Total Value. This study uses secondary data and is analyzed by Straight Line Equations. Research results obtained: 1. The contribution of the forestry sub-sector to the Pulang Pisau Regency economy began to decline in 2010-2018. Where the highest contribution was in 2010 which was 2.27% with a value of Rp 43,927.30 while the lowest contribution value was in 2018 which was 1,44% with a value of Rp 70.494,50 with an average growth of -5.45%. 2. The participation rate of Pulang Pisau Regency's employment opportunities from 2010-2018 tends to decrease. For the highest contribution, there were 73,12% in 2010, while the lowest contribution was in 2017 with a value of 46% with an average growth of 4,78%. 3. The Total Value of Forestry Subsector Exports in 2015-2019 increased from year to year from the analysis of the total value of total forestry exports in 2015-2019, the highest value was in 2018, namely USD 6,473,834.63 while the lowest was in 2015, which was USD 58,679 60*

**Keywords:** *Gross Regional Domestic Revenue, Labor, Total Export Value.*

---

## PENDAHULUAN

Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibu kota Pulang Pisau. Semboyan Kabupaten ini adalah "Handep Hapakat". Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah seluas 899.700 ha (5,85% dari luas Kalimantan Tengah sebesar 153.564 km<sup>2</sup>. Sehingga tidak asing lagi bagi masyarakat setempat banyak memanfaatkan hasil hutan, baik dalam hutan alam, perhutanan sosial, dan hutan tanaman industri. Kawasan hutan

produksi di Kabupaten Pulang Pisau terbagi menjadi 2 bagian yaitu hutan produksi tetap dengan luas 241.679,75 ha dan hutan produksi terbatas seluas 16.094,65 ha (BPS, 2017). Sedangkan hutan tanaman rakyat di Kabupaten Pulang Pisau seluas 1.912 hektar yang tersebar di 12 lokasi.

Pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten Pulang Pisau Itu terbagi menjadi 2 bagian yaitu pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan non kayu (HHBK). Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu adalah sebagai berikut: (

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau 2103)

Tanaman sengon, dimana tanaman sengon tersebut sangat baik digunakan untuk kayu papan/kayu lapis. Sebanyak 670.800 tanaman sengon diusahakan oleh rumah tangga usaha kehutanan di Kabupaten Pulang Pisau. Kecamatan Pandih Batu merupakan Kecamatan yang paling banyak mengusahakan tanaman sengon sebanyak 486.783 tanaman dengan luas 1.200 ha.

Tanaman akasia merupakan tanaman kehutanan terbanyak kedua yang diusahakan di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu sebanyak 23.470 tanaman. Kecamatan Maluku merupakan Kecamatan yang paling banyak mengusahakan tanaman akasia. Sebanyak 23.470 tanaman jati dimana luasnya mencapai 60 Ha.

Tanaman jabon yang saat ini merupakan tanaman yang mulai banyak diusahakan di Kabupaten Pulang Pisau, dan biasanya digunakan untuk bahan baku utama industri kayu olahan tercatat sebanyak 1.400 tanaman. Kecamatan Pandih Batu merupakan satu-satunya kecamatan yang mengusahakan tanaman jabon. Sebanyak 1.400 tanaman jabon dimana luasnya mencapai 4 ha.

Tanaman mahoni juga merupakan tanaman yang sangat baik untuk mebel dan furnitur selain tanaman jati. Tanaman mahoni yang diusahakan di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 294 tanaman. Kecamatan Pandih Batu (157 tanaman) dengan luas 0,4 Ha dan kecamatan Maluku merupakan Kecamatan yang banyak mengusahakan tanaman mahoni sebanyak 137 tanaman dengan luas 0,3 ha.

Tanaman jati yang merupakan tanaman yang sangat baik untuk mebel dan furnitur tercatat diusahakan di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 216

tanaman. Kecamatan Pandih Batu merupakan kecamatan yang paling banyak mengusahakan tanaman jati. Sebanyak 116 tanaman jati diusahakan di kecamatan tersebut dengan luas 0,3 ha.

Pemanfaatan hasil hutan non kayu meliputi: rotan, daun-daunan, buah-buahan, getah, bambu dan lain-lain, sedangkan produk non ekstraktif seperti rekreasi alam dan ekowisata, sehingga dari semua pemanfaatan dalam subsektor kehutanan sangat bermanfaat dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam rangka mencapai kontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau khususnya peningkatan nilai PDRB, maka yang terpenting adalah bagaimana sebaiknya hutan tersebut dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan umat manusia tidak hanya untuk masa kini, tapi juga untuk masa yang akan datang. Hal ini mengingat kontribusi subsektor kehutanan sangat menentukan terhadap besar kecilnya produk domestik regional bruto (PDRB). Tujuan penelitian ini adakah mengetahui trend subsektor kehutanan terhadap peningkatan PDRB, kesempatan kerja dan total nilai ekspor.

## METODE PENELITIAN

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini termasuk pengolahan data dan penulisan laporan akhir selama 2 (dua) bulan

### Prosedur penelitian

Prosedur penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu melakukan wawancara dengan dinas Kehutanan Kabupaten

Pulang Pisau, dinas Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja Indonesia, mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulang Pisau dan membuat tabulasi data berdasarkan sumber data yang diperoleh.

### Analisis Data

#### Nilai sub sector kehutanan dengan total Produk Domestik Regional Bruto

Besaran kontribusi pendapatan sector kehutanan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rumus sebagai berikut (Wibowo, 2003 dalam Jumri, 2006):

$$P = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Kontribusi subsector kehutanan terhadap PDRB (%)

X = PDRB subsector kehutanan (Rp)

y = Nilai total PDRB (Rp)  
Selanjutnya presentase kontribusi

#### Nilai subsector kehutanan terhadap kesempatan kerja.

Kontribusi subsector kehutanan terhadap kesempatan kerja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sukirno 2001 dalam Jumri, 2006)

$$TPAKSK = \frac{\sum AKSK}{\sum AKSS} \times 100\%$$

Keterangan:

TPAKSK : Tingkat partisipasi angkatan kerja sektor kehutanan.

$\sum AKSK$  : Jumlah angkatan kerja sektor kehutanan.

$\sum AKSS$  : Jumlah angkatan kerja semua sektor.

#### Nilai subsector kehutanan terhadap nilai ekspor.

Kontribusi subsector kehutanan terhadap nilai total ekspor dapat dihitung

dengan rumus sebagai berikut (Sukirno, 2007 dalam Jumri, 2006):

$$PESK = \frac{\sum ESK}{\sum ESS} \times 100\%$$

Keterangan

PESK : Persentase ekspor sektor Kehutanan

$\sum ESK$  : Jumlah ekspor sektor kehutanan

$\sum ESS$  : Jumlah ekspor semua sektor.

### Analisis trend model

Analisis *trend* model persamaan garis lurus (*straight line equation*) secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y : persentase tingkat partisipasi angkatan kerja subsector kehutanan tahun 2008- 2018

a : konstanta atau untuk  $\sum X = 0$

b : Besarnya perubahan Y untuk satu perubahan X

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Trend Subsector Kehutanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat kaitannya dengan sektor yang membentuknya. Sektor-sektor yang berpotensi besar berkontribusi pada perekonomian daerah maupun sektor yang perlu mendapat perhatian guna meningkatkan peranannya di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, hingga tercipta

pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin. Data hasil penelitian diperoleh kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau mulai tahun 2010-2018 mengalami penurunan. Dimana kontribusi tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu 2,27% dengan nilai Rp 43.927,30 sedangkan nilai kontribusi terendah ada pada tahun 2018 yaitu 1,44% nilai Rp 70.494,50 dengan pertumbuhan rata-rata -5,45%. Sehingga hal ini jelas menunjukkan bahwa kontribusi khususnya sektor kehutanan semakin lama akan semakin menurun, dan diteruskan oleh banyaknya lahan yang menjadi alih fungsi menjadi lahan konsesi gambut yang dulunya mengandung 90% air kini mengering akibat kanalisasi dan dihiasi oleh lahan sawit yang berjejer rapi.

Christinadan Pratiwi Yuli (2017) Menyatakan Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor potensial dan prospektif. Sektor ini memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kalimantan Tengah, peran sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah cenderung meningkat dari tahun ketahun. Walaupun pertumbuhan sektor ini kurang menonjol baik di Kalimantan Tengah maupun nasional kontribusinya cenderung menurun setiap tahun, namun sektor pertanian memiliki keunggulan komparatif. Pelaku usaha kehutanan seperti HPH mengalami kebangkrutan dan berbagai konflik lahan kerap terjadi, salah satunya adalah konflik antara perusahaan dan warga, konflik tata batas antara kampung dan kabupaten, tumpang tindih izin antara konsesi serta ketidakjelasan klaim kepemilikan lahan dan hutan, persoalan itu berhubungan dengan lemahnya penegakan hukum bagi sejumlah perusahaan yang beroperasi

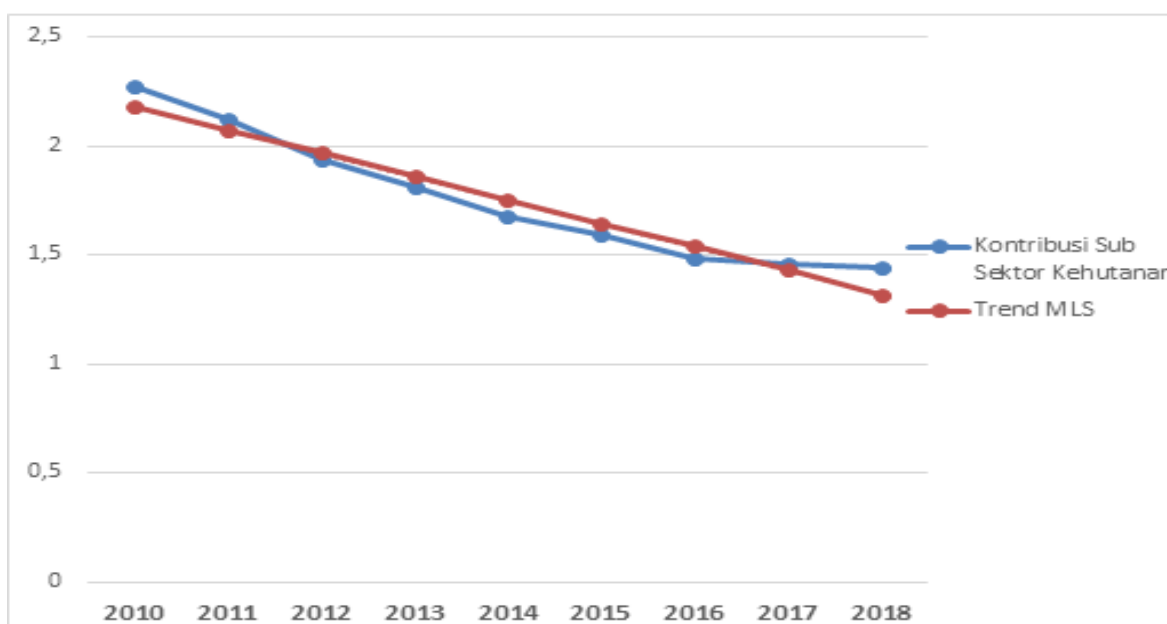
Table 1. Kontribusi dan Trend Subsektor Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap PDRB Pada Tahun 2010-2018

No	Tahun	Kontribusi (%)	Nilai	Pertumbuhan	Trend
			Juta(Rp)	(%)	MLS (%)
1	2010	2,27	43.927,30	-	2,182
2	2011	2,12	46.124,20	-6,60	2,075
3	2012	1,94	48.013,50	-8,21	1,968
4	2013	1,81	51.075,80	-6,70	1,861
5	2014	1,68	54.047,90	-7,54	1,754
6	2015	1,59	57.921,00	-5,39	1,647
7	2016	1,48	59.645,30	-6,73	1,540
8	2017	1,46	64.795,00	-1,30	1,433
9	2018	1,44	70.494,50	-1,16	1,320
Jumlah		15,79	496.044,50	-43,63	15,780
Rata-Rata		1,75	55,116,10	-5,45	1,753

secara ilegal. Selain kondisi diatas, adanya kebijakan pemerintah dalam hal perubahan status kawasan hutan menjadi kawasan lahan pertanian dan perkebunan, hal ini terlihat bahwa kontribusi pada sektor pertanian lebih dominan dibandingkan dengan subsektor kehutanan dalam kurun waktu 9 tahun terakhir.

Gambar 3 menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, yang dimana nilai trend sektor kehutanan tertinggi terhadap kontribusi PDRB Kabupaten Pulang Pisau tahun 2010 yaitu

nilai ekonomi yang terbesar dibandingkan dengan hasil hutan lainnya. Dalam sejarahnya hasil hutan pernah memberikan sumber devisa terbesar kedua setelah migas sehingga hutan disebut sebagai “emas hijau”. Peran dan kontribusi subsektor kehutanan Indonesia antara lain dalam bentuk sumbangan devisa negara mencapai US \$ 7-8 milyar per tahunnya, pendapatan negara dalam bentuk pajak dan non-pajak serta sebagai penyedia lapangan kerja. (Dulamin. J, 2006).



Gambar 1. Trend dan Kontribusi Subsektor Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau Terhadap PDRB Tahun 2010-2018

2,182% dan nilai terendah ada pada tahun 2018 yaitu 1,326% dengan rata-rata pertahun sebesar 1,754%. Disisi lain hingga saat ini kebutuhan masyarakat akan kayu baik domestik maupun internasional masih cenderung tinggi bahkan cenderung mengalami peningkatan, oleh karena itu kayu merupakan hasil hutan yang paling signifikan karena dapat menghasilkan

### **Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja Kabupaten Pulang Pisau.**

Pertumbuhan angkatan kerja yang besar dan kesempatan kerja yang terbatas menimbulkan konsekuensi meningkatnya jumlah pengangguran. Perubahan-perubahan yang disebabkan adanya pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian/tradisional ke sektor industry

modern, perkembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya dari sebelumnya mengandalkan sumber daya alam beralih ke sumber daya manusia menambah kompleksnya masalah ketenagakerjaan (Rachim, 2003). Penelitian ini menghasilkan nilai seperti pada Table 2.

khususnya di Kabupaten Pulang Pisau, hal ini sesuai dengan pernyataan Todaro (2008:68), bahwa pertumbuhan ekonomi atau pembangunan daerah akan menyebabkan pergeseran struktur ekonomi. Pergeseran struktur ekonomi secara perlahan akan menyebabkan peralihan dari sektor pertanian ke

Table 2. Kontribusi sektor pertanian terhadap kesempatan kerja kabupaten pulang pisau.

No	Tahun	Ketenaga	Kontribusi	Pertumbuhan	Trend
		Kerjaan	Sektor Pertanian (%)	%	MLS
		Sektor Pertanian			Orang
1	2010	40.614	73,12	-	72,496
2	2011	35.523	57,64	-21,17	68,874
3	2012	34.187	58,11	0,81	64,802
4	2013	28.751	52,61	- 9,46	60,73
5	2014	30.112	52,79	0,34	56,658
6	2015	43.473	66,69	26,33	52,586
7	2016	0	0	0	0
8	2017	31.097	46	- 31,02	44,442
9	2018	29.856	46,30	0,65	40,37
Jumlah		273.613	453,27	-33,52	460,958
Rata-rata		34.201,62	56,66	-4,78	57,620

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian yang dimana termasuk subsektor kehutanan didalamnya, terhadap kesempatan kerja Kabupaten Pulang Pisau mulai tahun 2010-2018 cenderung mengalami penurunan. Untuk kontribusi tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu 73,12%, sedangkan nilai kontribusi terendah ada pada tahun 2017 dengan nilai 46% orang dengan pertumbuhan rata-rata -4,78% .

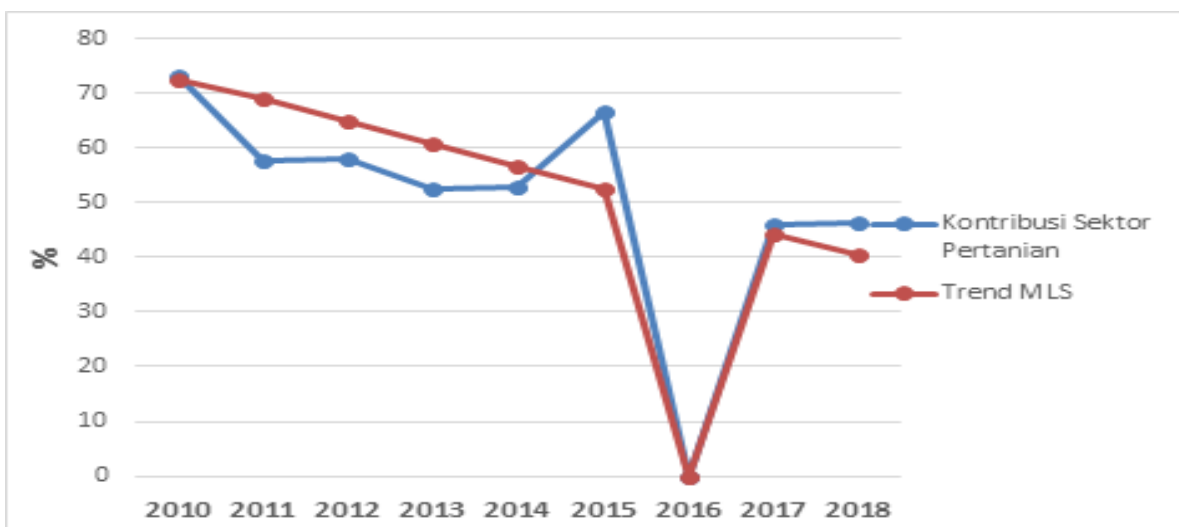
Hal ini menunjukkan penurunan peran sektor pertanian yang didalamnya terdapat subsektor kehutanan dengan imbas kenaikan pada sektor jasa mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi di Kalimantan Tengah

non pertanian yang dicerminkan melalui adanya kenaikan peranan sektor non pertanian dengan penurunan peranan sektor pertanian. Teori pembangunan Arthur Lewis dalam Kuncoro dan Mudrajat (2003), juga menyatakan bahwa jika pergeseran struktur ekonomi ini terjadi maka sektor pertanian akan semakin ditinggalkan, karena sebagian besar tenaga kerja pada sektor pertanian akan mulai beralih ke sektor yang lebih modern, seperti sektor jasa yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2014 Meskipun demikian sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor listrik, gas dan air, merupakan sektor yang mengalami penurunan jumlah pekerja, sebaliknya sektor yang mengalami peningkatan jumlah pekerja terjadi pada sektor industri, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan, angkutan dan komunikasi, sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, usaha persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja serta memiliki peranan besar dalam perekonomian Kabupaten Pulang Pisau yang dimana dalam tahap ini pemerintah dalam proses perintisan sesuai dengan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada Tahun 2018 yang dimana menyatakan akan menciptakan 39 juta tenaga kerja pada sektor kehutanan dan jumlahnya masih dapat meningkat dengan usaha yang lebih variasi dengan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Secara nasional berdasarkan data dari Pusat Perkayuan Indonesia tahun 1998, jumlah tenaga kerja yang terlihat dalam sektor kehutanan mencapai 3,85 juta orang dengan rincian 2,35 juta orang merupakan tenaga kerja primer yang terait langsung dengan pengusaha hutan dan 1,5 juta orang merupakan tenaga kerja yang tidak terlihat secara langsung atau tenaga kerja sekunder. Dengan setiap asumsi setiap pekerja mempunyai seorang istri dan dua orang anak, maka jumlah jiwa yang bergantung pada kegiatan kehutanan dapat mencapai angka 1517 juta orang (APHI, 2004).

Gambar 2 menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun dan dibuktikan dengan nilai trend kontribusi subsektor kehutanan terhadap kesempatan kerja kabupaten Pulang Pisau dengan angka tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu 72,496% dan nilai terendah ada pada tahun 2018 yaitu 40,37% dengan rata-rata pertahun sebesar 57,620%. Menurut Farhad (2006), salah satu masalah utama dalam ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah. Masalah kualitas sumberdaya manusia juga erat



Gambar 2. Trend dan Kontribusi Ketenaga Kerjaan Sektor Pertanian KabupatenPulang Pisau Terhadap PDRB Tahun 2010-2018

kaitannya dengan masalah kependudukan. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi juga berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang akan berpartisipasi dalam pembangunan atau dapat dikatakan jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja akan semakin bertambah.

### **Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap Nilai Total Ekspor Kabupaten Pulang Pisau.**

Menurut Tarigan (2006) bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Begitu pula dengan pendapat para penganut merkantilisme yang menyatakan bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sesedikit mungkin impor. Dengan demikian, pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor dan mengurangi serta membatasi impor. Begitu juga dengan penelitian ini menunjukkan tingkat ekspor yang cukup tinggi, seperti ditampilkan dalam Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai total ekspor kehutanan tahun 2015-2019 nilai tertinggi ada pada tahun 2018 yaitu USD 6.473.834,63 sedangkan yang terendah ada pada tahun 2015 yaitu USD 58.679,60. Sehingga terlihat bahwa setiap tahunnya perubahan nilai yang cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 302,47% pertahun. Peningkatan ekspor dalam sektor kehutanan ini diakibatkan dari banyaknya permintaan manusia akan hasil dari hutan baik berupa produk/barang. Menurut pandangan Kusdiana, D & Candra W. 2007 besarnya tingkat ekspor akan mempengaruhi produksi nasional karena aktivitas ekspor menunjukkan permintaan efektif yang berasal dari luar negeri. Semakin tinggi ekspor artinya semakin tinggi pula produksi lokal yang mampu dipasarkan sehingga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Trend juga menunjukkan peningkatan ekspor pada sektor kehutanan dengan rata-rata pertahun 14,808%. Peningkatan ini diduga berkaitan erat dengan mulai berkembangnya industri-industri kehutanan. Hal ini terjadi antara lain sebagai

Table 3. Kontribusi subsektor kehutanan terhadap nilai total ekspor di Pulang Pisau

No	Tahun	Nilai Ekspor (US \$)	Kontribusi PESK %	Pertumbuhan %	Trend MLS (US \$)
1	2015	58.679,60	0,94	-	-0,068
2	2016	610.133,00	9,19	877,65	7,37
3	2017	719.322,00	6,33	-31,12	14,808
4	2018	6.473.834,63	29,73	369,66	22,246
5	2019	6.337.049,97	27,86	-6,28	29,684
Jumlah		12.164.113,60	74,04	-1.209,91	74,04
Rata-rata		2.432.822,72	14,808	302,47	14,808



dampak dari pelarangan ekspor kayu bulat yang dilakukan bertahap dari 1980 sampai 1985. Adapun dampak kebijakan ini adalah untuk pengembangan industri hasil hutan di dalam negeri, yaitu :

- Meningkatkan devisa dari ekspor kayu olahan
- Memperluas kesempatan kerja di bidang industri hasil hutan
- Meningkatkan nilai tambah
- Memacu perkembangan ekonomi regional

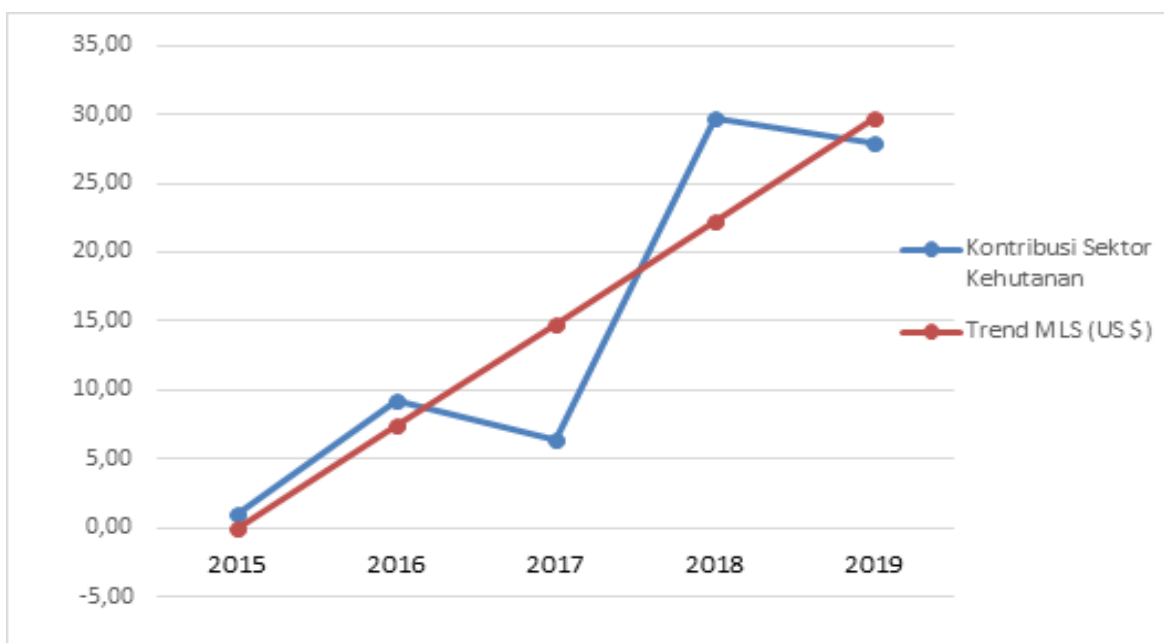
Kebijakan ini akhirnya mewujudkan Indonesia sebagai eksportir utama kayu olahan, yang digunakan sebagai bahan baku sektor ekonomi lainnya. Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk menjadikan sektor kehutanan strategis dalam perekonomian antara lain adalah dengan meningkatkan efisiensi sektor kehutanan, meningkatkan ketersediaan bahan baku dengan cara

meningkatkan luas kawasan hutan produktif dan meningkatkan kualitas produk (hasil hutan) sehingga mempunyai keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh produk substitusinya (Simangunsong, 2004).

Gambar 3 menunjukkan peningkatan ekspor, sehingga dalam hal ini perkembangan aktifitas lapangan usaha industri pengolahan secara tidak langsung turut mendorong peningkatan aktifitas ekspor terutama di Kabupaten Pulang Pisau.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kontribusi subsektor kehutanan Kabupaten Pulang Pisau mulai Tahun 2010-2018 mengalami penurunan, dimana kontribusi tertinggi ada pada tahun 2010 yaitu 2,27% dengan nilai Rp43.927,30



Gambar 5. kontribusi subsektor kehutanan terhadap nilai total ekspor di Kabupaten Pulang Pisau

sedangkan nilai kontribusi terendah ada pada tahun 2018 yaitu 1,44% dengan nilai Rp 70.494,50 dengan pertumbuhan rata-rata -5,47%, dengan rata-rata trend 1,754%.

Tingkat partisipasi angkatan kerja sektor pertanian pada Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010-2018 mengalami penurunan. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada subsektor Kehutanan yang terdapat pada sektor pertanian tertinggi berada pada Tahun 2010 yakni sebesar 73,12, dan terendah pada tahun 2017 sebanyak 46%. Dalam kurun 9 tahun terakhir mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar -4,78%.

Total nilai ekspor subsektor kehutanan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2015-2019 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Nilai ekspor tertinggi subsektor kehutanan terjadi pada tahun 2019 sebesar 6.473.834,63 juta US \$ dan terendah pada tahun 2015 yaitu 58.679,60 Juta US \$ dengan rata-rata pertumbuhan 302,47%.

### Saran

Pemerintah daerah maupun pusat, agar lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada terkhusus sektor kehutanan, karena umumnya masih banyak terjadinya konflik kawasan, tumpang tindih peraturan.

Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat mengatasi kerusakan hutan khususnya di Pulang Pisau. Serta melakukan rehabilitasi pada lahan kritis agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan kebutuhan kayu diperiode mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah E. 2011. Pengembangan Wisata Alam di Kabupaten Sumedang Provinsi JawaBarat [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Ahmad R. D., 2018 Menganalisis keunggulan peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015 Universitas Muhammadiyah Malang.
- Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia, 2004. Konsep Mewujudkan Kembali Kebangkitan Sektor Kehutanan Dalam Pembangunan Nasional kedepan “ APHI, Jakarta
- Aswan, 2019 Analisis Kontribusi Sektor-Sektor Perekonomian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kota Parepare Universitas Muslim Indonesia.
- Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. STIE YKPN Yogyakarta.
- Aryadi, Mahrus. 2012. Hutan rakyat: Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat. UMM: Malang.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Badan Pusat Statistik Tabel Dinamis. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik:  
<https://www.bps.go.id/site/resultTab>
- BPS Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019.
- Christina dan Pratiwi Yuli, 2017. Analisis Sektor Unggulan dan Transformasi Struktural di Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2016.

- Departemen kehutanan, 1999. Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan. departemen kehutanan, Jakarta.
- Departemen Pertanian. 1976. Vademecum Kehutanan Indonesia. Jakarta: Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Kehutanan.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA). 2003. Pedoman analisis daerah operasional obyek dan daya tarik wisata. Ditjen PHKA, Bogor.
- Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau 2013.
- Fauzi, A. 2004. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Farhad, Z. 2006. Analisis Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Kabupaten Pidie. Skripsi. Fakultas Pertanian Unsyiah. Banda Aceh.
- Forest Watch Indonesia. 2011. Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009. Bogor.
- Grima, A.P.L, and F. Berkes. 1989. "Natural Resources: Access, Right to Use and Management" in Berkes, Fikret (ed). Common Property Resources: Ecology and Community-based Sustainable Development. Belhaven Press, London.
- Jhingan, M.L. 2008. Ekonomi Pembangunan dan perencanaan. Jakarta: Rajawali Press
- Jumri, 2006. Peran Subsektor Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Khususnya Produk Domestik Regional Bruto, Kesempatan Kerja dan Ekspor. Tesis. UNLAM, Banjarmasin.
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 – 2034.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. Perencanaan Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Kuncoro, Murdrajat. 2006. "Ekonomi Pembangunan", Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2017, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Kusdiana, D & Candra W. 2007. Analisis Daya Saing Ekspor Sektor Unggulan di Jawa Barat. Jurnal Trikonomika Fakultas Ekonomi Pasundan Vol. 6, No.1. Bandung
- Mahalli, Kasyful. 2008. Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan.
- Mcgahey S. 2012. The ethics, Obligation, and Stakeholders of Ecotourism Marketing. *Intellectual Economic*. 6(2):75-88.
- Mustafa, H., 2003. Peran Subsektor Perkebunan Khususnya Tanaman Karet Terhadap Perekonomian Beberapa Kabupaten Kalimantan Selatan. Banjarbaru.
- Nasir M. 2013. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Ekonomi Kabupaten Sukabumi [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Pasal 10 tentang Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional.
- Rachim, A. 2003. Peluang Kerja Dokter Pasca PTT di Perusahaan. Buletin V Lembaga Ekonomi Unsyiah. Banda Aceh.
-

- Rees, J. 1990, *Natural Resources: Allocation, Economics and Policy*, London: Routledge.
- Simangunsong, B.C.H. 2004. *The Economic Performance of Indonesia's Forestry Sector in The Period 1980-2002. Briefing Paper#4. GTZ-\SMCP. Jakarta*
- Suhendang. 2002. *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Bogor: Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Sukirno, S., 2001. *Pengantar Ilmu Teori Macro Ekonomi Edisi II.* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, 2007. *Makro ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara. Jakarta
- Todaro, M. Smith, S.C., 2008. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesembilan*. Erlangga: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*.
- Yakin Addinul, 2004. *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan: Teori dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Akademika Presindo, Jakarta.
-